

ABSTRAK

DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MERESPON RED II UNI EROPA TAHUN 2019-2023

Oleh

BASARIA BR. AMBARITA

Kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) Uni Eropa yang mengklasifikasikan minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai *high risk feedstock* atau bahan baku nabati berisiko tinggi dianggap mengancam keberlanjutan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Kondisi ini mendorong Indonesia untuk melakukan berbagai upaya diplomasi ekonomi sebagai produsen terbesar CPO global. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya diplomasi ekonomi dalam merespon kebijakan RED II uni Eropa.

Penelitian ini menggunakan teori diplomasi ekonomi Bayne dan Woolcock dengan fokus menganalisis empat upaya yaitu: penguatan sertifikasi ISPO, negosiasi bilateral IEU-CEPA, serta penggunaan arena multilateral CPOPC dan WTO. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka yang bersumber dari situs resmi berupa *website* dan kanal Youtube pemerintah dan badan dan asosiasi kelapa sawit yang dikelola Indonesia: Kementerian Pertanian, Ditjenbun, PASPI, GAPKI, BPDPKS, dan Kementerian Perdagangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut bersifat adaptif dan menunjukkan upaya Indonesia dalam menyesuaikan diri terhadap tekanan global yang hadir dari RED II. Upaya-upaya tersebut membentuk sinergi dan kolaborasi secara domestik dan internasional. Namun upaya-upaya ini belum mampu mengubah persepsi Uni Eropa atas CPO serta masih adanya ketimpangan kekuasaan dalam tata kelola perdagangan CPO global. Melalui tiga upaya tersebut, peneliti mendapatkan temuan bahwa upaya Indonesia melalui IEU-CEPA yang paling signifikan mendekati visi dan tujuannya sebagai respon Indonesia dalam menghadapi RED II Uni Eropa.

Kata Kunci: CPO, Diplomasi Ekonomi, Indonesia, RED II, Uni Eropa

ABSTRACT

INDONESIA'S ECONOMIC DIPLOMACY IN RESPONDING THE EUROPEAN'S UNION RED II, 2019-2023

by

BASARIA BR. AMBARITA

The European Union's Renewable Energy Directive II (RED II), which classifies crude palm oil (CPO) as a high-risk feedstock is perceived as a direct threat to the sustainability of Indonesia's CPO exports to the EU. As the largest global producer of CPO, Indonesia has undertaken a series of economic diplomacy measures in responses to this directive. This research aims to describe Indonesia's economic diplomacy efforts in addressing RED II. Guided by Bayne and Woolcock's economic diplomacy framework, the analysis focuses on four key measures: strengthening the Indonesian Sustainable Palm oil (ISPO) certification, bilateral negotiations within the Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA) and the utilization of multilateral platforms through the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) and the World Trade Organization (WTO). This study employs a qualitative method through document analysis, using official sources including such as the Ministry of Agriculture, Directorate General of Plantations, PASPI, GAPKI, BPD PKS, and the Ministry of Trade. This research findings shows that Indonesia's responses characterized as adaptive to adjust the global pressures which striving from RED II while creating synergy between domestic and international efforts. However, these measures have not fully significant to change the EU's perception on CPO and the structural power asymmetry still remains. Among all of the efforts, the IEU-CEPA demonstrate the highest effects in advancing Indonesia's efforts in responding to the RED II.

Keywords: CPO, Economic Diplomacy, European Union, Indonesia, RED II